

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*

TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

MARIA MEILINDA
NIM.C2COO9237

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Maria Meilinda

Nomor Induk Mahasiswa : C2C 009 237

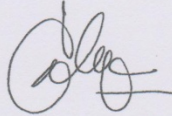
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)**

Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, SE., M.Si, Akt.

Semarang, 22 Mei 2013

Dosen Pembimbing,



(Nur Cahyonowati, SE., M.Si, Akt.)

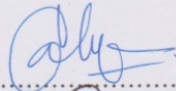
NIP. 19810813 200801 2007

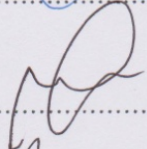
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

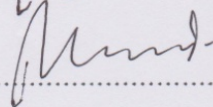
Nama Penyusun : Maria Meilinda
Nomor Induk Mahasiswa : C2C 009 237
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 5 Juni 2013

Tim Penguji:

1. Nur Cahyonowati, SE., M.Si, Akt. (..........)

2. Faisal, SE.,Msi.,Akt,Ph.D. (..........)

3. Dul Muid, SE., M.Si., Akt. (..........)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”

(Matius 6:33)

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan”

(Yeremia 17:7)

“Cukuplah kasih karuniaKu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaKu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.”

(2 Korintus 12 : 9)

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA

Tuhan Yesus, sumber kekuatanku

Papi dan Mami tercinta yang begitu tulus mencintai dan menginspirasi

Kakak dan adikku tersayang: Daniel Leoardi dan Debora Agustina

Teman-teman terbaikku yang selalu menemani

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Maria Meilinda, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)**”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Semarang, 22 Mei 2013

Yang Membuat Pernyataan,

Maria Meilinda

NIM. C2C 009 237

ABSTRACT

This research investigates the influence of corporate governance influences on tax management behavior. Tax management is measured by effective tax rate. Corporate governance are measured by number of commissioner, percentage of independent commissioner, and compensation of commissioner and executives. Company size, profitability, debt ratio, and different tax rate are used as control variables.

This research sample is manufactured company selected by using method of purposive sampling. There are 153 companies fulfilling criterions. This research used multiple regression analysis.

The results of this research indicates that the number of commissioner, company size, profitability, and debt ratio affect tax management significantly. Meanwhile, the proportion of independent commissioners, compensation of commissioner and executive, and different tax rate does not significantly influence the company's tax management.

Keyword: *corporate governance, tax management, effective tax rate, board of commissioner, independent commissioner, compensation of commissioner and executives.*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh tata kelola perusahaan terhadap perilaku manajemen pajak. Manajemen pajak diukur dengan tarif pajak efektif. Tata kelola perusahaan diukur dengan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi. Ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan beda tarif digunakan sebagai variabel kontrol.

Sampel penelitian ini adalah sektor manufaktur pada tahun 2009-2011 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel penelitian adalah 153 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian ini. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan. Sementara itu, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, dan beda tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan.

Kata Kunci : tata kelola perusahaan, manajemen pajak, tarif pajak efektif, dewan komisaris, komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karuniaNya yang tak terbatas dan penyertaan-Nya yang setia sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **”PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S-1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan itikad dan semangat untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Akuntansi. Penulis menyadari bahwa karya ini hanya sebagian kecil dari ribuan karya lain, namun penulis berharap agar karya ini tetap memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik bantuan tenaga, materi, informasi, waktu, maupun dorongan yang tidak terhingga. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Nasir, M.si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro
3. Ibu Nur Cahyonowati, SE., M.si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan segala bimbingan, arahan, petunjuk dan kemudahan dengan sangat sabar dan telaten selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE, M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis selama masa menempuh studi di Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membagi ilmunya kepada penulis.
6. Papi dan Mami tercinta yang telah memberikan untaian doa, dukungan baik moril maupun materiil, kepercayaan, kesabaran, perhatian, pengorbanan, serta segala curahan kasih sayang yang tiada henti dan sangat besar tak ternilai harganya bagi penulis.
7. Daniel Leoardi, kakak terbaikku dan Debora Agustina, adik terbaikku. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungannya kepada penulis.
8. Yopy Octavian terkasih, sebagai orang yang selalu mendukung, membantu, menyemangati, dan mendampingi penulis.
9. My best partner Prita Saraswati dan Immanuel Natanatel atas dukungan dan semangatnya selama ini.

10. Bang Bernad, Mas Riandoko, dan Mas Dicky Wahyudi yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku Galuh Ayu, Novia Ayu, Heriawan, Ricky Rosari, Adeline, dan Azizah Amalia yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Teman seperjuangan Akuntansi 2009 Prasetya Puji, Putri Arsika, Anis, Kania, Veliandina, Chintya Fadila, Lulus Sri Lestari, Dian Sastriana, dan Almas Khoirina yang telah menyemangati penulis.
13. Teman – teman KKN 2012 Desa Truko, Kecamatan Kangkung, Kendal. Osa Kusnanda, Vesia Kriskaritta, Zulfikar Dikri, Danar Amarta, Yulia Widyastuti, dan Berkah Nur Rakhman. Terima kasih untuk pengalaman singkat yang sangat berharga, kebersamaan dan perjuangan selama KKN.
14. Teman – teman PMK yang sangat luar biasa, terimakasih teman-teman sudah jadi teman dan sahabat dalam pelayanan dan pengalaman yang menumbuhkan kasih, iman dan pengharapan, terkhusus untuk angkatan 2009: Vera, Nandana, Hayu, Edo, Fendy, Renhard, Chrisnanty, Togi, Winda, Naomey, Arya, Petrus, Deka, Trias Evensia, Cika, Qhey, Glory, Ayu, Okta, Manda, Dian, dll.
15. Adik anggota acaraku Gyna Lea, Krisnauli Pakpahan, dan Randi Pujas untuk kebersamaan selama ini di acara. Serta adik PMK Adiel Amandus, Rexy, Inka, Enny, Esy, Olin, Brillli, Yosua, Ari, Lena, dan seluruh keluarga besar PMK FEB yang telah menyemangati penulis.

16. Seluruh teman – teman Akuntansi kelas A Reguler II angkatan 2009 atas kebersamaan dan kekompakan selama kuliah.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi terutama bagi penelitian yang sejenis.

Semarang, 22 Mei 2013
Penulis

(Maria Meilinda)
NIM : C2C 009 237

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	12
2.1.2 Pajak	14
2.1.3 Manajemen Pajak.....	18
2.1.4 Akuntansi Pajak Penghasilan	24
2.1.5 <i>Corporate Governance</i>	26
2.1.5.1 Manfaat dan Tujuan <i>Corporate Governance</i>	27
2.1.5.2 Prinsip – Prinsip <i>Corporate Governance</i>	28
2.1.5.3 Struktur <i>Corporate Governance</i>	29
2.1.6 Dewan Komisaris.....	32
2.1.7 Komisaris Independen.....	33
2.1.8 Kompensasi.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
2.4 Perumusan Hipotesis.....	39
2.4.1 Jumlah Dewan Komisaris dan Manajemen Pajak	39
2.4.2 Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak	40
2.4.3 Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi dan Manajemen Pajak	41

BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
3.1.1 Variabel Dependen	44
3.1.1.1 Manajemen Pajak	44
3.1.2 Variabel Independen	46
3.1.2.1 Jumlah Dewan Komisaris	46
3.1.2.2 Persentase Komisaris Independen	47
3.1.2.3 Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	47
3.1.3 Variabel Kontrol	47
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan	48
3.1.3.2 Kinerja Perusahaan	48
3.1.3.3 Tingkat Hutang Perusahaan	49
3.1.3.4 Beda Tarif Pajak	49
3.2 Populasi dan Sampel	51
3.3 Jenis dan Sumber Data	52
3.4 Metode Pengumpulan Data	52
3.5 Metode Analisis	53
3.5.1 Statistik Deskriptif	53
3.5.2 Asumsi Klasik	53
3.5.2.1 Normalitas Data	53
3.5.2.2 Multikolinearitas	54
3.5.2.3 Heteroskedastisitas	55
3.5.2.4 Autokorelasi	56
3.5.3 Analisis Regresi Berganda	56
3.5.4 Pengujian Hipotesis	58
3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)	58
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	59
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	60
4.2 Analisis Data	61
4.2.1. Statistik Deskriptif	61
4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	65
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	66
4.2.3.1 Uji Normalitas	66
4.2.3.1.1 Perbaikan Data Untuk Memenuhi Asumsi Normalitas	69
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas	72
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	73
4.2.3.4 Uji Autokorelasi	77
4.2.4 Analisis Regresi	79
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	82
4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	83
4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)	84

4.3 Pembahasan	89
4.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak	90
4.3.2 Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak.....	91
4.3.3 Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap Manajemen Pajak	92
4.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak.....	94
4.3.5 Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Manajemen Pajak.....	95
4.3.6 Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan terhadap Manajemen Pajak	95
4.3.7 Pengaruh Beda Tarif Pajak terhadap Manajemen Pajak	96
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Keterbatasan.....	100
5.3 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN – LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	50
Tabel 4.1	Penentuan Sampel Penelitian	61
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Beda Tarif Pajak (TARIF).....	64
Tabel 4.4	Uji Normalitas Awal	69
Tabel 4.5	Uji Normalitas setelah menghilangkan <i>outlier</i>	72
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	73
Tabel 4.7	Uji Glejser – Model 1 GETR.....	75
Tabel 4.8	Uji Glejser – Model 2 CETR	76
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Autokorelasi – Model 1 GETR.....	77
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Autokorelasi – Model 2 CETR.....	77
Tabel 4.11	Rekapitulasi Hasil Regresi	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model <i>Single Board System</i>	30
Gambar 2.2	Model <i>Dual Board System</i>	31
Gambar 2.3	Model <i>Dual Board System</i> di Indonesia.....	32
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis	38
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas: Grafik Histogram	67
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas: Grafik Normal P-P Plot.....	67
Gambar 4.3	Hasil Uji Normalitas: Grafik Histogram (setelah menghilangkan <i>outlier</i>)	70
Gambar 4.4	Hasil Uji Normalitas: Grafik Normal P-P Plot (setelah menghilang- kan <i>outlier</i>)	71
Gambar 4.5	Scatterplot – Model 1 GETR.....	74
Gambar 4.6	Scatterplot – Model 2 CETR.....	74
Gambar 4.7	Hasil Pengujian dengan Durbin Watson (DW Test)	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Perusahaan Sampel	108
Lampiran B	Tabulasi Data	110
Lampiran C	Hasil Output SPSS	122

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dalam menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak. Selain itu, akan dijabarkan pula rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei PricewaterhouseCoopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (FCGI, 2002). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan mengeluarkan Pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan

efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia (Barton *et al.*, 2004). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Aria, 2012). Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Menurut Irawan dan Aria (2012), penerapan *corporate governance* diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Banyak upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan

ke negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

Byrnes & Lavelle (2003) menemukan bahwa saham-saham *bluechip* di pasar modal Amerika Serikat dijadikan alat oleh perusahaan guna menerapkan manajemen pajak. Hal ini dilakukan sebagai salah satu tempat persaingan dengan cara melakukan *benchmarking effective tax rate* (ETR) dengan perusahaan rival mereka. Perusahaan melakukan manajemen pajak dengan berbagai cara seperti *tax-favored investment* sampai dengan pengalihan keuntungan ke *tax heaven country*.

Tax-favored investment adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan investasi pajak dari perusahaan yang bersangkutan (Minnick dan Noga, 2010). *Tax-favored investment* memungkinkan terjadinya pengalihan keuntungan ke *tax heaven country*. *Tax heaven country* adalah merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa sebuah negara menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya (Desai, *et.al.*, 2006). *Tax heaven country* merupakan suatu bentuk negara yang menerapkan sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pajak internasional. *Tax heaven* sendiri sudah cukup dikenal oleh kalangan pebisnis karena memberikan kemudahan perpajakan. Menurut *Government Accountability Office AS*, negara yang melakukan *tax heaven* dapat tercermin dari indikasi berikut:

1. pajak nihil atau nominal

2. kurangnya pertukaran informasi yang efektif terhadap pajak dengan otoritas pajak asing
3. kurangnya transparansi dalam operasi legislatif, ketentuan hukum atau administratif
4. tidak ada persyaratan untuk kehadiran lokal substantif
5. promosi diri sebagai *offshore financial centre*, yaitu keadaan untuk menggabungkan semua negara yang sebanding dengan populasi penduduk mereka dengan sektor keuangan.

Byrnes & Lavelle (2003) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan seperti General Electric dan Marriott terkenal dengan *effective tax rate*-nya (ETR) atau tarif pajak efektif yang secara konsisten rendah. Dengan menerapkan manajemen pajak, Marriott telah dapat menurunkan tarif pajak efektif dari 36,1% di 2001 menjadi 6,8% di 2003. Manajemen pajak yang digunakan oleh Marriott adalah dengan cara berinvestasi pada mesin berbahan bakar batubara. Dengan berinvestasi sebesar US\$60.000.000, Marriott dapat menghasilkan penghematan pajak sebesar US\$74.000.000. Marriott berinvestasi pada negara yang termasuk *tax heaven country*, di mana negara yang tidak membebankan pajak atau membebankan pajak dalam jumlah minimal. Oleh karena itu, Marriott dapat melakukan penghematan pajak dengan cara berinvestasi.

Suandy (2008) menyebutkan bahwa asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba

akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar (Damayanti, 2009). Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Oleh karena itu, investasi dijadikan salah satu strategi dalam penghematan pajak (Minnick dan Noga, 2010).

Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Ketiga variabel ini akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut.

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen. FCGI (2004) menyatakan komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan

dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara), serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik. Adapun kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Bernad, 2011). Dalam hal ini yang dimaksud pemilik perusahaan adalah dewan komisaris dan pengelola perusahaan adalah dewan direksi. Hal ini dilakukan agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui GAAP *effective tax rate*. Hal

ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

Dari penelitian sebelumnya, penulis ingin melihat perbedaan penerapan sistem pajak di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Penulis juga termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai bagaimana *corporate governance* perusahaan mempengaruhi manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan tarif pajak efektif. Penelitian ini mengulang penelitian Minnick dan Noga (yang sebelumnya telah dilakukan di Amerika Serikat) dengan adaptasi terhadap karakteristik *corporate governance* di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen di suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (*tax management*).

Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak memiliki peranan yang sangat penting

bagi setiap perusahaan, karena dengan dilakukannya manajemen pajak maka dapat diminimalkan beban yang harus dikeluarkan atas pajak perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh dalam meningkatkan laba bagi perusahaan. Manajemen pajak dilakukan guna menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2008).

Kebijakan tindakan pengelolaan pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. Kualitas *corporate governance* yang masih buruk dapat mendorong manajer untuk bertindak lebih agresif dalam pengelolaan manajemen pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Sejalan dengan Desai dan Dharmapala (2006), Sari (2010) dalam penelitiannya menemukan pengaruh negatif yang tidak signifikan atas penerapan *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Literatur sebelumnya membuktikan adanya hubungan antara penerapan *corporate governance* dan pengelolaan manajemen pajak. Sampai saat ini belum ada hasil yang konsisten mengenai hubungan penerapan *corporate governance* dengan manajemen pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian terhadap masalah ini masih terbuka luas untuk menemukan pengaruh yang tepat dari penerapan *corporate governance* terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh persentase jumlah komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan *corporate governance*, serta dapat menambah wawasan dan referensi

untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan manajemen pajak.

2. Bagi investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik *corporate governance* perusahaan bersangkutan. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya manajemen pajak dengan upaya meminimalkan pajak terutang serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan melakukan manajemen pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum arah penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memaparkan konsep dan teori yang melandasi seluruh permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berdasarkan landasan teori, standar, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana pembentukan populasi dan sampel penelitian, definisi variabel yang diteliti, metode pengumpulan data, model penelitian, serta prosedur pengolahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil serta saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, selain itu dalam telaah pustaka juga akan membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan juga hasil-hasilnya. Secara sistematis, bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di

dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Irfan, 2002) .

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya *check and balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Hapsari, 2011).

Pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan sangat dibutuhkan. Bagian terpenting yang menjadi dasar dari terlaksananya konsep *corporate governance* adalah dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk manajemen pajak (Egon, 2000 dalam FCGI, 2004).

Masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menimbulkan munculnya biaya. Disinilah letak pentingnya *corporate governance*, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency cost* terdiri atas *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Corporate governance* dikatakan dapat menurunkan *monitoring cost* dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi. *Bonding cost* merupakan *agency cost* yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada *shareholder* bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan (Lestari, 2007).

Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal (Marga, 2011). *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).

2.1.2. Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, yang dimaksud dengan “*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan*

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Judisseno (1997) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Mardiasmo (2002) mengemukakan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Zain (2008) menyimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/ anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Dalam bidang perpajakan, dikenal istilah *statutory tax rate* (STR) atau tarif pajak statutori (TPS) dan *effective tax rate* (ETR) atau tarif pajak efektif (TPE). Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu dan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku serta secara terus-menerus menjadi objek reformasi pajak. Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap sebuah perusahaan.

Menurut Walby (2010) membagi tarif pajak menjadi empat macam, yaitu

- a. Tarif Pajak Statutori (*Statutory Tax Rate*)

Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Contoh dari tarif statutori adalah tarif PPh badan sebesar 25%.

- b. Tarif Pajak Rata-Rata (*Average Tax Rate*)

Tarif pajak rata-rata adalah rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif pajak rata-rata akan menjadi berbeda

dengan tarif pajak statutori ketika tarif pajak statutori memiliki tarif yang bertingkat. Pada saat tersebut tarif pajak rata-rata akan lebih rendah daripada tarif pajak statutori. Contohnya adalah lapisan tarif PPh perseorangan yang memiliki tarif 5% sampai dengan 35%, tetapi bisa saja tarif rata-ratanya berada pada tingkat 13%.

c. Tarif Pajak Marginal (*Marginal Tax Rate*)

Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Contohnya penghasilan kena pajak A sebesar Rp85.000.000,00. Tarif pajak yang berlaku adalah 5% untuk Rp0 - Rp50.000.000,00 dan tarif 15% berlaku untuk Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00. Atas Rp35.000.000,00 penghasilan A akan dikenakan tarif sebesar 15%, dan 15% adalah tarif marginal.

d. Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*)

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Berkaitan dengan empat macam tarif pajak yang dikemukakan oleh Walby (2010), Waluyo (2008) menjelaskan bahwa dikenal empat macam struktur tarif pajak yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak, yaitu

a. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif. Yang pertama adalah tarif progresif progresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin besar. Yang kedua adalah progresif tetap, yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap dan yang terakhir adalah tarif progresif regresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

c. Tarif pajak regresif

Tarif pajak regresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

d. Tarif pajak tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak

2.1.3 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2005).

Strategi mengoptimalkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak

di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Suwarta dalam Bernad (2011) strategi mengefisienkan beban pajak tersebut seperti:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan konsinyasi lebih menguntungkan dibanding Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan. Umumnya Pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil (misalnya Indonesia Timur) seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena

Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*). Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.

4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.
5. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode yang diizinkan dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam keadaan inflasi, metode *average* akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang

cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

7. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Manajemen pajak atau perencanaan pajak adalah kegiatan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang berfokus pada pengendalian setiap transaksi dan konsekuensi pajaknya. Hal ini bermaksud agar pengendalian pajak tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Tidak seperti *tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Bernad (2011) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus mengerti unsur-unsur berikut :

- *Tax Compliance*

Tax compliance merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan. Kegiatan ini meliputi administrasi yang harus dilakukan, pembukuan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya.

- *Tax Planning*

Tax planning merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* dalam arti yang luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen pajak.

- *Tax Litigation*

Tax litigation merupakan usaha-usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah-masalah yang tidak ada aturannya secara jelas. Sengketa pajak terjadi antara wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan atau penelitian pajak. Di Indonesia, *tax litigation* berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan, banding, gugatan dan cara-cara lain yang sesuai dengan undang-undang.

- *Tax Research*

Tax research merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi, atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi penentuan fakta-fakta yang akan dianalisis, mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi, mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh, mengembangkan kesimpulan, merumuskan kesimpulan, mengembangkan rekomendasi, merumuskan rekomendasi, dan mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat.

Paparan diatas menyebutkan bahwa perencanaan pajak atau manajemen pajak merupakan kesatuan dari perencanaan strategis perusahaan, sehingga perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pajak. Kiswara (2008) menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen pajak harus ditempuh pertimbangan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Manajemen pajak dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, dan pemilihan lokasi usaha), menjalankan perusahaan (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi) sampai dengan menutup perusahaan (restrukturisasi usaha, likudasi, merger, pemekaran, dan sebagainya).

Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat informasi (Minnick dan Noga, 2010).

2.1.4. Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut Muljono (2006), akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Teori akuntansi pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 Poin C Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak badan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam SPT yang disampaikan oleh wajib pajak terdapat laba perusahaan yang merupakan objek pajak penghasilan. Laba yang tertera dalam laporan keuangan tidak bisa secara langsung dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak karena masih merupakan laba akuntansi.

Dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak badan dan disampaikan dalam SPT perusahaan adalah laba fiskal. Laba akuntansi disusun oleh akuntan dengan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, sedangkan laba fiskal

disusun menggunakan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Oleh karena hal ini, atas laba akuntansi harus dilakukan koreksi terlebih dahulu dengan menggunakan Undang-Undang Perpajakan sehingga menjadi laba fiskal.

Penyusunan yang berbeda dalam penghitungan laba menurut akuntansi dan perpajakan maka menyebabkan perbedaan jumlah antara penghasilan sebelum pajak (laba akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal) atau yang biasa disebut dengan *book tax differences*. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya pos-pos penghasilan yang diakui oleh akuntansi, tetapi tidak diakui oleh perpajakan. Demikian pula sebaliknya, perbedaan bisa terjadi karena adanya pos-pos pendapatan yang tidak diakui dalam akuntansi, tetapi diakui oleh perpajakan. Perbedaan juga bisa disebabkan karena adanya beban-beban yang diakui dalam akuntansi, tetapi tidak diakui dalam perpajakan. Sebaliknya, dimungkinkan pula adanya beban-beban yang tidak diakui dalam akuntansi, tetapi diakui dalam perpajakan. Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan dan beban dapat bersifat sementara (*temporary*) ataupun bersifat tetap (*permanent*).

Sesuai PSAK No.46, perbedaan sementara adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan sementara terdiri dari penyisihan/akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi dan kompensasi rugi. Beda sementara juga ditimbulkan karena adanya penyusutan dan amortisasi. Secara fiskal, penyusutan dan amortisasi mempunyai ketentuan tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan 11A UU PPh. Ketentuan ini mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi dan masa manfaat. Pembukuan penyusutan dan amortisasi yang dilakukan

oleh akuntan mungkin saja memiliki masa manfaat dan metode yang berbeda dengan perpajakan sehingga timbul beda sementara. Sedangkan perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

2.1.5 *Coorporate Governance*

World Bank mendefinisikan *corporate governance* dalam konteks internasional sebagai hal yang menyatukan hukum, peraturan, dan praktik sektor swasta yang tepat. *Corporate governance* memungkinkan perusahaan untuk menarik sumber daya manusia dan modal, berkinerja efisien, sehingga secara jangka panjang akan menghasilkan nilai ekonomis yang terus menerus bagi pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan. Ernst & Young mengatakan bahwa *corporate governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan, terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi, dewan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perusahaan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk.

Corporate governance timbul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku manajemen dari sikap mementingkan diri sendiri bertujuan untuk menciptakan pengawasan dalam perusahaan yang memastikan adanya optimalisasi atas pemenuhan kepentingan stakeholder serta menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Menurut Michelon (2010) esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas

manajemen terhadap *stakeholders* serta pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya *good corporate governance*, perusahaan akan mendapatkan manfaat, antara lain perbaikan dalam komunikasi, minimalisasi potensi benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan manfaat (*sustainability of benefits*), promosi citra korporat (*corporate images*), dan perolehan kepercayaan investor.

2.1.5.1. Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Menurut *Forum Corporate Governance Indonesia* penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Surya dan Yustiavandana (2006) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan *good corporate governance* adalah:

1. Mempermudah akses terhadap investasi domestik maupun asing.

2. Mempermudah biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.1.5.2. Prinsip – Prinsip *Corporate Governance*

Dalam menerapkan *corporate governance* yang sesuai manfaat dan tujuannya, perusahaan harus menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* di setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip dasar dari *corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.

Menurut FCGI (2002) terdapat lima prinsip mengenai praktik *corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian (*independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

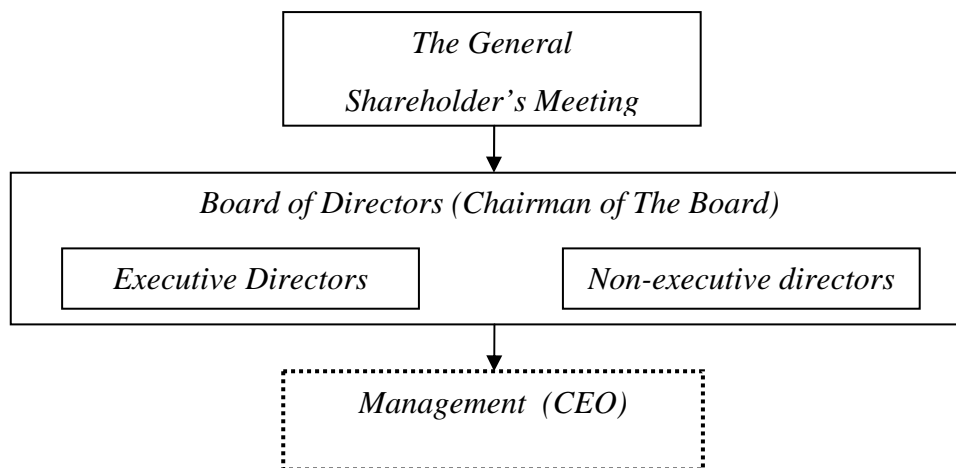
2.1.5.3. Struktur *Corporate Governance*

Struktur *corporate governance* menunjukkan hubungan antar berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang berguna dalam menentukan arah strategis serta mengawasi kinerja perusahaan. Secara spesifik struktur *corporate governance* harus didesain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali (Arifin, 2005).

Umumnya terdapat dua model struktur internal *corporate governance* di dunia, yaitu Model *The Anglo-American System* dan Model *The Continental European System*. Model *The Anglo-American System* merupakan model yang digunakan di US, UK, dan Kanada (Kamal, 2010). Struktur *corporate governance* dengan model *The Anglo-American System* ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *Board of Directors* (*executive directors* dan *non-executive directors*), serta *executive managers* yang dipimpin oleh CEO. Model *The Anglo-American*

System ini biasa disebut *single* atau *one board system*. Sistem ini menggunakan satu sistem pengawasan. Biasanya perusahaan hanya memiliki satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan direktur independen (Non-Direktur Eksekutif).

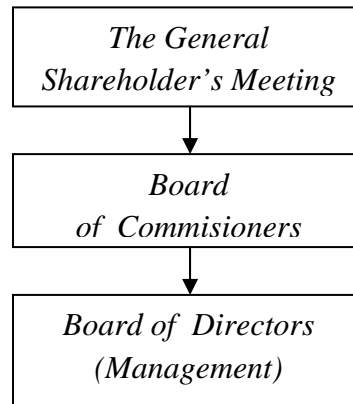
Gambar 2.1
Model *Single Board System*



Sumber: FCGI (2002)

Sementara model *Continental Europe* merupakan model yang digunakan di Jepang, Jerman, dan Perancis (Kamal, 2010). Struktur *corporate governance* dengan model *Continental Europe* terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *Board of Commisioners* (Dewan Komisaris) sebagai dewan pengawas, dan *Board of Directors* (Dewan Direksi) sebagai eksekutif perusahaan atau manajemen. Pemisahan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi yang dikenal dengan sebutan Model *Dual Board System* atau *Two Board System*.

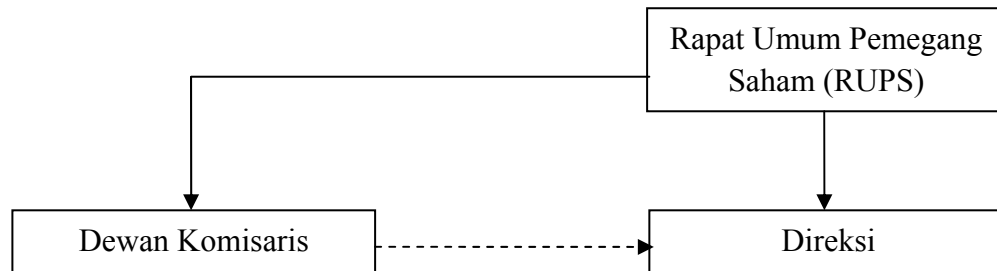
Gambar 2.2
Model *Dual Board System*



Sumber: FCGI, 2002

Pada dasarnya struktur *governance* diatur dalam Undang-Undang sebagai dasar legitimasi berdirinya entitas (Arifin, 2005). Penerapan struktur *corporate governance* di Indonesia menggunakan Model *Dual Board System* atau *Two Board System*. Sistem ini menggunakan dua sistem pengawasan yang terpisah. Dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan dewan direksi, sedangkan dewan direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan. Penerapan Model *Dual Board System* dalam struktur *corporate governance* di Indonesia berbeda dengan Model *Continental Europe* (FCGI, 2002).

Gambar 2.3
Model *Two Board System* di Indonesia



Sumber: FCGI, 2002

2.1.6. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Indonesia menganut *system dual board (two-tier)* seperti yang dipakai di Eropa dalam struktur organisasi internalnya. Satu *board* dikenal sebagai dewan komisaris, dan satu yang lain dikenal sebagai dewan direksi. Keduanya merupakan inti dari mekanisme pengendalian internal. Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan non independen. Dewan komisaris secara luas dipercaya memainkan peranan penting dalam pengendalian internal dan *corporate governance*, khususnya memonitor manajemen (Gunarsih dan Hartadi, 2002).

Menurut Egon Zehnder (2000), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset,
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil,
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan,
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, dan
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

2.1.7. Komisaris Independen

Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan *review* atas implementasi strategi tersebut. Menurut Herwidayatmo (2000) komisaris independen dapat membantu memberikan

kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur.

Komisaris sebuah organisasi adalah anggota dewan pengawasnya. Beberapa istilah spesifik digunakan untuk menjelaskan keberadaan atau ketiadaan hubungannya terhadap organisasi tersebut. Komisaris (atau komisaris dalam, *inside director*) adalah seorang komisaris yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Komisaris dalam mewakili kepentingan dari para pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut.

Komisaris luar (komisaris independen) adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris luar diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi. Mereka bisa mengawasi komisaris dalam dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan. Komisaris luar biasanya berguna dalam melerai sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris luar dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam *conflict of interest*. Di sisi lain, komisaris luar mungkin kekurangan pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

Dalam FCGI (2002) keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, dikemukakan bahwa

perusahaan yang terdaftar di bursa harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional yang dimaksudkan adalah memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (*non-controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

2.1.8. Kompensasi

Menurut Mahapatro (2010) kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang menunjukkan jenis *reward* yang diterima oleh individu untuk menghargai kinerjanya. Kompensasi adalah bentuk balas jasa organisasi atas pelaksanaan tugas yang diembankan kepada individu di dalam organisasi. Kompensasi menjadi hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka secara sukarela telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan mandat organisasi. Sistem kompensasi (*pay system*) berhubungan dengan bagaimana pegawai dibayar atau bagaimana kompensasi didistribusikan (Guthrie, 2007). Sistem kompensasi terdiri atas kompensasi ekonomi dan non-ekonomi atau non-moneter (Reilly *et al*, 2007). Kompensasi ekonomi misalnya gaji, tunjangan, remunerasi dan bonus, sedangkan kompensasi non-ekonomi bisa berupa cuti, penghargaan, kenaikan pangkat, fasilitas kerja yang lengkap dan pujian.

Kompensasi memiliki tiga tujuan dasar, yaitu menarik, menahan dan memotivasi *key empolee* (Cheeks, 1982). Kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan,

dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Bagi perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai manajemen pajak telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia (Minnick dan Noga, 2010; Noor dan Azam, 2010; Bernad, 2011; Irawan dan Aria, 2012; Sabli dan Noor, 2012). Beberapa penelitian tersebut telah berhasil membuktikan keterkaitan antara *corporate governance* dengan manajemen pajak namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hasil penelitiannya pun bervariasi. Ringkasan mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat analisis	Hasil Penelitian
1.	Minnick dan Noga (2010)	<u>Variabel Independen</u> <i>Increase pay performance, external governance</i> <u>Variabel Dependen</u> <i>Tax management</i>	<i>Multivariate analysis, Hansen test of exogeneity</i>	- Menemukan hubungan positif antara dewan komisaris dengan GETR dan CETR - Kompensasi dalam bentuk insentif jangka panjang bagi dewan komisaris dan direksi akan memotivasi untuk melakukan <i>tax management</i>

2.	Noor, Syazwani dan Azam (2010)	<u>Variabel Independen</u> <i>Tax system and the characteristics of companies</i> <u>Variabel Dependen</u> <i>CETR</i>	<i>Descriptive statistics, Univariate analysis, Regression result</i>	-Menemukan hubungan positif antara <i>CETR</i> dengan karakter perusahaan dan sistem pajak
3.	Bernad (2011)	<u>Variabel Independen</u> Karakteristik <i>corporate governance</i> dan kompensasi <u>Variabel Dependen</u> Manajemen pajak	<i>Multivariate analysis, Regression panel data model</i>	-Menemukan hubungan signifikan positif antara jumlah dewan komisaris dengan <i>CETR</i> dan hubungan signifikan negatif antara proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi dengan <i>CETR</i>
4.	Irawan dan Aria (2012)	<u>Variabel Independen</u> Kompensasi manajemen, kepemilikan saham direksi, <i>corporate governance</i> <u>Variabel Dependen</u> Manajemen pajak	<i>Regression panel data model</i>	-Menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara <i>corporate governance</i> dan kompensasi dengan <i>CETR</i>
5.	Sabli dan Noor (2012)	<u>Variabel Independen</u> <i>Proportion of independent directors, institutional investors</i> <u>Variabel Dependen</u> <i>CETR</i>	<i>The Multivariate Regression Models, Univariate tests</i>	- Menemukan hubungan yang tidak signifikan antara <i>corporate governance</i> dengan <i>CETR</i>

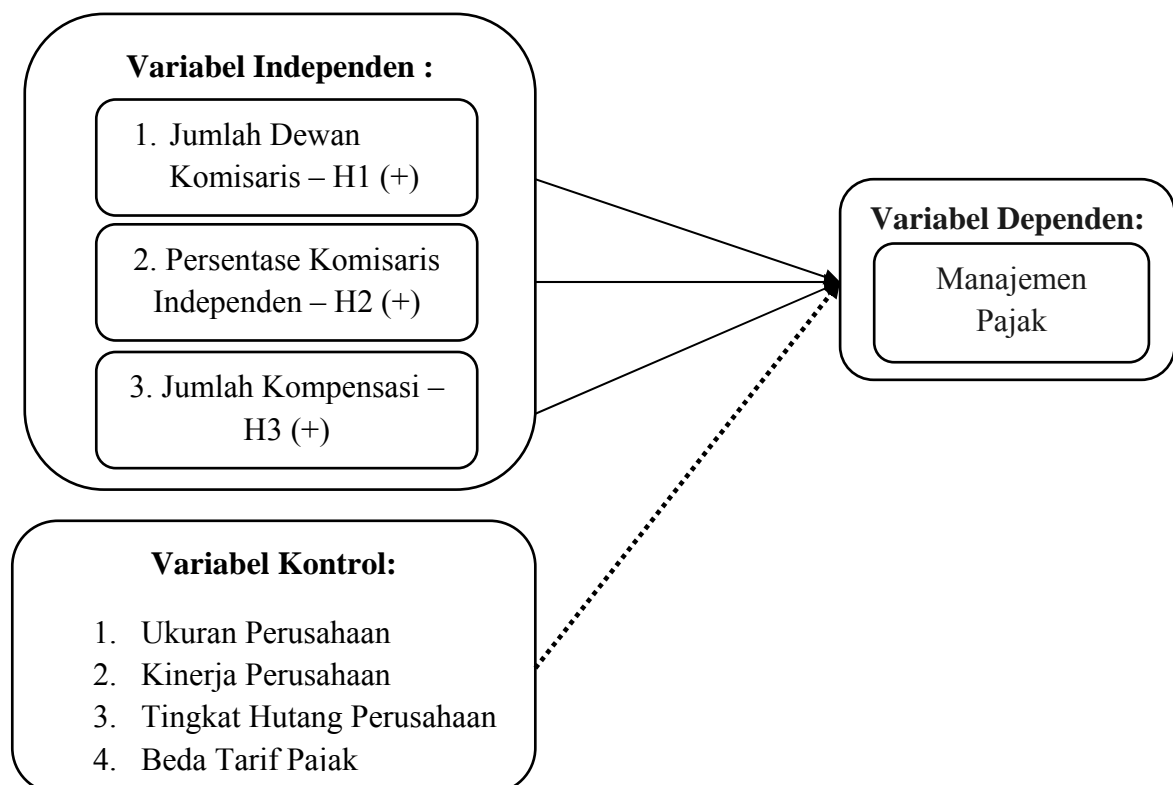
Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan faktor *corporate governance* dalam hal ini dilihat dari jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi, serta ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan beda tarif pajak sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan.

Untuk membantu dalam memahami dinamika variabel-variabel di atas, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diungkapkan, disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka penelitian yang disusun sebagai berikut:

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Jumlah Dewan Komisaris dan Manajemen Pajak

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum *good corporate governance*, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jensen dan Meckling (1976) bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Coles et al. (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat.

Sebaliknya, Bhagat dan Black (1999) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang sedikit akan menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih baik.

Sejalan dengan pemikiran Bhagat dan Black (1999), Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulis menentukan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan besar dan memiliki kompleksitas tinggi. Diharapkan semakin banyak jumlah dewan komisaris akan menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

2.4.2. Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak

Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi *equity* mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme

pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh,1993).

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang luas terhadap *stakeholders*-nya. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan dari manajemen (Michelon dan Parbonetti, 2010). Dalam penelitian Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa adanya nilai positif terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan pendorong yang signifikan dari kinerja *bottom line*. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernad, 2011). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan:

H2 : Persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

2.4.3. Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi dan Manajemen Pajak

Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik akan memberikan kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukannya, bukan karena keberuntungan semata (Bertrand dan Mullinathan, 2001). Tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang

dengan menggunakan bentuk insentif *stock option* maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa manajemen pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; Desai dan Dharmapala, 2006). Hal ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan ekonomis antara pihak prinsipal dan para manajer selaku agen. Manajer akan cenderung bertindak apabila pengelolaan pajak tersebut memberikan manfaat kepada mereka juga, sehingga akan timbul masalah agensi karena asimetris informasi yang dimiliki oleh manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/prinsipal. Untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut pihak prinsipal dapat mengeluarkan sejumlah biaya untuk manajemen (*agency cost*). Biaya tersebut dapat berupa jumlah kompensasi yang tepat kepada manajer. Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menambah nilai perusahaan, salah satunya, melalui manajemen pajak yang baik (Irawan dan Aria, 2012).

Dalam penelitiannya mengenai hubungan antara tingkat pajak efektif perusahaan dengan pengukuran kinerja CEO dan manajer, Phillips (2003) berpendapat bahwa pemberian kompensasi berperan memotivasi kinerja manajer dalam meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh *tax sheltering* dan pemberian kompensasi yang tinggi

untuk para manajer. Mereka menemukan bukti yang beda bahwa peningkatan kompensasi untuk manajer cenderung mengurangi tingkat *tax sheltering*. *Tax sheltering* merupakan upaya mengurangi tingkat pendapatan kena pajak sehingga tercapai efisiensi pembayaran pajak.

Sejalan dengan yang lain, dalam penelitian Armstrong et al. (2012) serta Minnick dan Noga (2010) juga menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal manajemen pajak yang dapat meminimalisasi tingkat pajak efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan:

H3 : Jumlah kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen pajak. Variabel independen yang akan diteliti antara lain jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi, sedangkan variabel kontrol yang akan diteliti adalah ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan beda tarif pajak.

3.1.1 Variabel Dependen

3.1.1.1. Manajemen Pajak

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen, yaitu manajemen pajak. Manajemen pajak diukur dengan GAAP ETR dan *Cash* ETR. ETR adalah alat yang paling sering digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bisa melakukan

tax avoidance yang merupakan bagian dari manajemen pajak. GAAP ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan standar pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. GAAP ETR dihitung dengan rumus yang dipergunakan oleh Dyreng et al (2007), sedangkan *Cash ETR* dihitung dengan rumus yang dipergunakan oleh Derashid dan Zhang (2003). Model ini menggunakan total beban pajak satu tahun sebagai pembilang dan pendapatan sebelum pajak satu tahun sebagai penyebut untuk mengestimasi nilai GAAP ETR. Untuk mengestimasi *Cash ETR*, model ini menggunakan jumlah pajak satu tahun dikurangi pajak tangguhan sebagai pembilang dan sebagai penyebut digunakan pendapatan sebelum pajak selama satu tahun.

Penelitian ini akan menggunakan nilai ETR dalam rentang 0 – 1. Perusahaan yang memiliki nilai ETR di luar rentang tersebut tidak diperhitungkan dalam analisis. Hal ini untuk menghindari adanya distorsi pada ETR dan masalah dalam model yang digunakan. Dalam akuntansi pajak penghasilan, beban pajak dihitung berdasarkan jumlah beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pajak tangguhan mencerminkan pajak yang akan dibayarkan atau dikembalikan pada masa yang akan datang sebagai hasil dari *book-tax differences*. Perbedaan tersebut merupakan manajemen pajak yang paling efektif dan populer dalam mengurangi pajak dan memaksimalkan *time value of money*. Berikut adalah model untuk mengestimasi GAAP ETR dan *Cash ETR*.

$$GAAP\ ETR\ (GETR) = \frac{Tax\ expense_{t,t}}{Pretax\ Income_{t,t}}$$

$$\text{Cash ETR (CETR)} = \frac{\text{Cash tax paid}_{i,t}}{\text{Pretax income}_{i,t}}$$

Dimana :

- GAAP ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan standar pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku
- *Cash ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan pajak penghasilan badan yang dibayarkan
- $\text{Tax expense}_{i,t}$ adalah total beban pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- $\text{Cash tax paid}_{i,t}$ adalah beban pajak kini untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- $\text{Pretax Income}_{i,t}$ adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Jumlah Dewan Komisaris

Variabel ini diberi simbol BOARD. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris mempengaruhi efektifitas pengawasan dalam perusahaan. Konsisten dengan penelitian Subramaniam *et al* (2009), variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota yang tergabung dalam dewan komisaris.

3.1.2.2 Persentase Komisaris Independen

Dalam penelitian ini presentasi komisaris independen disimbolkan dengan INDEP. Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewan komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010).

$$\text{Persentase Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100 \%$$

3.1.2.3 Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi

Kompensasi dalam penelitian ini adalah total yang diterima oleh keseluruhan dewan komisaris dan direksi dalam bentuk apapun dibagi dengan *revenue* perusahaan. Komisaris dan direksi biasanya diberikan remunerasi berupa uang, saham, maupun *stock option*. Dalam penelitian ini kompensasi dewan komisaris dan direksi disimbolkan dengan COMP.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini, variabel kontrol yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Dyreng *et al.* (2007) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memainkan peranan dalam manajemen pajak. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan disimbolkan dengan SIZE. Proxy dalam mengukur besarnya perusahaan adalah dengan logaritma natural dari total aset perusahaan pada akhir tahun.

3.1.3.2 Kinerja Perusahaan

Richardson dan Lanis (2007) mengemukakan bahwa operasi perusahaan dapat memberikan dampak kepada manajemen pajak. Operasi perusahaan tercermin dari kinerja perusahaan. Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk refleksi kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kinerja, aktivitas, sumber daya yang telah dipakai, dicapai, dan digunakan (Bernad, 2011). Untuk melihat kinerja secara keseluruhan tanpa mengesampingkan efek manajemen pajak, maka digunakan ROA sebagai proxy (Minnick dan Noga, 2010). Sari dan Martani (2010) mengemukakan bahwa ROA digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengontrol profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan disimbolkan dengan ROA. Kinerja perusahaan dihitung dengan menggunakan ROA. Formula ROA yaitu:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

3.1.3.3 Tingkat Hutang Perusahaan

Jensen (1986) menunjukkan bahwa tingkat utang yang tinggi akan mengurangi masalah keagenan. Dengan menerbitkan utang, manajemen akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang beserta bunganya di masa depan. Pembayaran ini tentu saja bisa dilakukan apabila kinerja perusahaan baik. Oleh karena itu, utang dapat mengurangi masalah keagenan. Dalam penelitian ini rasio hutang disimbolkan dengan DEBT. Rasio Hutang dihitung dengan formula *Debt Ratio*. Formula *Debt Ratio* yaitu:

$$\text{Debt ratio} = \frac{\text{total debt}}{\text{book value of equity}}$$

3.1.3.4 Beda Tarif Pajak

Dalam UU No.38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tercantum perubahan tarif pajak badan, yaitu: (1) 28% (diefektifkan tahun 2009) dan 25% (diefektifkan tahun 2010) dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini variabel beda tarif pajak disimbolkan dengan TARIF. Variabel ini menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai 0 untuk sampel tahun 2009 dan nilai 1 untuk sampel tahun 2010 serta tahun 2011.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengukuran
1	Variabel Dependen - Manajemen Pajak	$GAAP\ ETR\ (GETR) = \frac{Tax\ expense_{t,c}}{Pretax\ Income_{t,c}}$ $Cash\ ETR\ (CETR) = \frac{Cash\ tax\ paid_{t,c}}{Pretax\ income_{t,c}}$
2	Variabel Independen - Jumlah Dewan Komisaris (BOARD) - Persentase Komisaris Independen (INDEP) - Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi (COMP)	$BOARD = \sum \text{seluruh anggota yang tergabung dalam dewan komisaris}$ $INDEP = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$ $COMP = \frac{\text{total yang diterima seluruh dw.komisaris \& direksi}}{\text{Revenue Perusahaan}}$
3	Variabel Kontrol - Ukuran Perusahaan (SIZE) - Kinerja Perusahaan (ROA) - Tingkat Hutang Perusahaan (DEBT) - Beda Tarif Pajak (TARIF)	$SIZE = \text{logaritma natural total aset}$ $ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$ $DEBT = \frac{total\ debt}{book\ value\ of\ equity}$ <p>0 untuk tahun 2009 ; 1 untuk tahun 2010 dan tahun 2011</p>

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai tahun 2009-2011. Sampel merupakan elemen dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pertimbangan dan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 31 Desember 2009 dan tidak *delisting* selama periode 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2011
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember untuk periode 2009, 2010 dan 2011.
3. Perusahaan sampel mempunyai data yang lebih lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu perusahaan mengungkapkan data mengenai jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi terhadap dewan komisaris serta direksi.
4. Perusahaan sampel melakukan pembukuan dengan menggunakan mata uang rupiah.
5. Perusahaan sampel memiliki laba setelah pajak bernilai positif untuk tahun 2009, 2010, dan 2011.

6. Perusahaan sampel memiliki nilai **GAAP ETR (GETR)** dan **Cash ETR (CETR)** 0-1.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang sumbernya berasal dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011 dalam situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan di *database* Pojok BEI Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini.

2. Studi dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan menjadi sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Nilai rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak semua data dapat diterapkan regresi. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan uji regresi adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal.

Untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan pada *one sample kolmogorov-smirnov test* adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual. Jika angka probabilitas $< \alpha = 0,05$ variabel tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas $> \alpha = 0,05$ H_A ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen).

Menurut Ghozali (2006) multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang disajikan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel

terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Setiap analisis harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik plot nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Dasar analisis :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2005)

Di samping menggunakan metode grafik, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode statistik berupa uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan

meregresikan nilai absolut residual sebagai variabel dependen dengan variabel independennya. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 1999).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Pada penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW test). Jika d lebih kecil dibandingkan dengan dl atau lebih besar dari $4-dl$, H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika DW terletak di antara DU dan $4-DU$, berarti tidak terjadi autokorelasi.

Autokorelasi Positif	Daerah Ragu-Ragu	Tidak Ada Autokorelasi	Daerah Ragu-Ragu	Autokorelasi Negatif
0	dl	Du	$4-du$	$4-dl$

Keterangan :

dl : Nilai batas bawah tabel Durbin Watson

du : Nilai batas atas tabel Durbin Watson

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis regresi berganda berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas atau penjelas, dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel bebas atau penjelas, dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis ini juga mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha_0 + \beta_1 BOARD + \beta_2 INDEP + \beta_3 COMP + \beta_4 SIZE + \beta_5 ROA + \beta_6 DEBT + \beta_7 TARIF + \varepsilon$$

1.i

Dimana :

- ETR terdiri atas GAAP ETR dan Cash ETR
- α_0 adalah konstanta
- $\beta_{1,2,3,4,5,6,7}$ adalah koefisien variabel
- BOARD adalah jumlah dewan komisaris
- INDEP adalah persentase komisaris independen dalam dewan komisaris
- COMP adalah jumlah kompensasi atau remunerasi dewan direksi dan dewan komisaris dibagi dengan penjualan perusahaan
- SIZE merupakan variabel kontrol yang dihitung dengan logaritma dari total aset perusahaan

- ROA merupakan variabel kontrol yang dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset
- DEBT merupakan variabel kontrol yang dihitung dengan membagi total hutang terhadap total ekuitas
- TARIF merupakan variabel kontrol yang menggunakan variable *dummy*, dimana 0 untuk tahun 2009 dan 1 untuk tahun 2010 dan 2011.
- ϵ_i adalah *residual of error*
- i adalah perusahaan ke i

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Secara statistik, setidaknya pengujian hipotesis ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F, dan nilai statistik t.

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu

variabel independen, maka R^2 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 seperti yang banyak dianjurkan peneliti. Dengan menggunakan nilai *adjusted* R^2 dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006). Uji statistik F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model penelitian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). H_0 yang ingin diuji adalah apakah suatu parameter dalam model sama dengan nol, jika:

$\alpha > 0,05$: tidak mampu menolak H_0 , dan

$\alpha < 0,05$: menolak H_0